

ANALISIS *SMART GOVERNANCE* DI KABUPATEN REMBANG

Yashinta Gusti Vallenty

NPP. 30.0732

Asdaf Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email : vallenty.yashinta@gmail.com
Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Sadu Wasistiono., MS

ABSTRACT (in english)

Problems/Background (GAP): *(Contains the background of the research). The author focuses on Smart Governance by the Rembang District Communication and Information Service. Based on the results of an evaluation conducted by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform regarding the 2021 SPBE, the SPBE index scores for 15 Regencies/Cities that have the Smart City program in Central Java Province, Rembang Regency are considered to still have a low score. Purpose: The purpose of this research is to find out and analyze Smart Governance by the Communication and Informatics Office of Rembang Regency. Methods: The method used in using a qualitative approach with a descriptive approach. Determination of informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection techniques were obtained from various data sources in order to answer the problems of researchers using primary and secondary data carried out by interview, observation, documentation, and triangulation techniques. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results/Findings: The results of the study show that the three dimensions of smart governance put forward by Cohen, that smart governance is good. However, there are some things that should be fixed and added. For example, the expansion of online payments in government administration needs to be expanded again, infrastructure such as the availability of free public wifi, data centers, integration of health and safety services needs to be improved and the number added. Therefore, the researcher suggests to the Rembang Regency Information and Communication Service to build super apps, build an ideal data center and invite parties outside the government to produce data on the Open Portal of Rembang Regency. Conclusion: The Smart Governance process in Rembang Regency at the Rembang Regency Communication and Information Service has been well implemented and of course needs to be maximized and improved considering that ICT is always developing all the time.*

Keywords: *Analysis, Smart Governance, Rembang Regency*

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada Smart Governance oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. Berdasarkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai SPBE Tahun 2021, nilai indeks SPBE terhadap 15 Kabupaten/Kota yang memiliki program Smart City di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang dinilai masih dalam angka yang rendah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis Smart Governance oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang. **Metode:** Metode yang digunakan dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik penegumpulan data diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan peneliti menggunakan data primer dan sekunder dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tiga dimensi smart governance yang dikemukakan oleh Cohen, bahwa smart governance sudah baik. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditambahkan. Seperti perluasan pembayaran online dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diperluas kembali, infrastruktur seperti ketersediaan wifi umum gratis, data center, integrasi pelayanan kesehatan dan keselamatan perlu ditingkatkan dan ditambah jumlahnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada Dinas Komunikasi, Informasi Kabupaten Rembang untuk membangun super apps, membangun data center yang ideal serta mengajak pihak di luar pemerintahan untuk melakukan produksi data pada Portal Open Kabupaten Rembang **Kesimpulan:** Proses *Smart Governance* di Kabupaten Rembang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sudah terlaksana dengan baik dan tentunya perlu dimaksimalkan dan ditingkatkan mengingat TIK yang selalu berkembang setiap saatnya.

Kata Kunci: Analisis, *Smart Governance*, Kabupaten Rembang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan harapan setiap masyarakat, juga menjadi indikator sebuah negara yang baik. Peran pemerintah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas suatu negara agar dapat menyejahterakan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsinya pemerintahan dituntut untuk efektif, cepat, dan efisien ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan dapat optimal.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengatur urusan pemerintahannya sendiri, pada undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai terselenggaranya pelayanan publik yang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerahnya. Pada pasal 9 dijelaskan mengenai “pembagian urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan. Selanjutnya, mengenai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam pasal 12 ayat 2 salah satunya yaitu tentang komunikasi dan informatika. Pada pasal 345 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas – asas pelayanan publik”. Maka berdasarkan undang-undang tersebut dan dengan kondisi perkembangan teknologi sekarang, pelayanan publik menjadi salah satu hal utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Dengan demikian perlu adanya pengembangan konsep pelayanan publik secara digital yang diterapkan pada pemerintah daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika.

E-government adalah suatu penerapan konsep dengan prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum, namun memiliki pengertian dan penerapan dalam suatu negara yang tidak dapat dipisah dari beberapa factor seperti sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, serta kondisi ekonomi masing-masing negara yang berbeda. Tujuan dari penerapan *e-government* adalah agar hubungan dalam tata pemerintahan (*governance*) yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, produktif, dan responsif (Hardijaloka, L., 2014; 250).

Berkembangnya konsep Smart City, menimbulkan pemahaman yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian-penyelesaian masalah, yang kemudian sukses meningkatkan performa smart city di dalam kota. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Contoh di Indonesia beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Malang memiliki masalah penambahan penduduk yang signifikan, kemacetan, penumpukan sampah dan masalah kependudukan lainnya yang memerlukan pemecahan masalah yang tepat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Rembang yang menerapkan Smart City. Pemda Kabupaten Rembang memiliki angka SPBE 2,76 dan berada di posisi rendah dari 15 Kabupaten/Kota yang memiliki program Smart City di Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan pemerintahan yang maju dan berkualitas. Evaluasi yang dilakukan mencakup beberapa aspek, diantaranya mengenai tata kelola, kebijakan internal dan mengenai SPBE. Artinya SPBE di Kabupaten Rembang belum terwujud secara optimal.

Sebagai bentuk upaya keseriusan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam usaha peningkatan smart city, diadakan penyusunan rencana aksi pemastian keberhasilan program smart city dengan melakukan bimbingan teknis tahap dua penyusunan masterplan smart city. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi perangkat Daerah, seperti pada tahap pertama membahas enam dimensi itu 1)Smart Governance, 2)Smart Branding, 3)Smart Ekonomi, 4)Smart Living, 5)Smart Society dan 6)Smart Environment. Dilaksanakan pula Bimtek tahap kedua, peserta diarahkan pada pembuatan strategi dan program yang mendukung Smart City. Bimtek ini adalah lanjutan dari bimtek pertama yang telah dilakukan pada bulan Juni 2022. Ada tujuh permasalahan utama di Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Mencakup, tata kelola

pemerintahan, kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, lingkungan hidup dan kemandirian desa.

Dalam Penerapan konsep Smart City terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya yaitu Smart Governance. Konsep Smart Governance memuat salah satu unsur penting badan atau instansi pemerintah yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar mudah diakses oleh yang berkepentingan secara efisien dan efektif

Setiap perangkat daerah pastinya dituntut untuk dapat memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ia harus memiliki kemampuan yang sesuai baik itu dari responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, menjaga kelangsungan hidup pelayanan, transparan dan rasa empati. Terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mutlak diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengelola informasi agar terwujudnya kinerja yang sesuai. Namun pada pelaksanaan *Smart Governance* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Rembang belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Yang pertama, yaitu penelitian Regan Vaughan, dkk. (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan E-Government melalui web subang.co.id. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan SPBE sudah baik, hambatan yang terjadi pada implementasinya tidak terlalu signifikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Penelitian kedua, yaitu penelitian Maulina Sartika, Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020) tentang “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai” Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa SDM berkompeten dan Program SPBE berjalan baik. Namun masih banyak terdapat masyarakat maupun ASN yang menggunakan pola pikir lama sehingga tidak memaksimalkan pelayanan berbasis elektronik.

Penelitian ketiga yaitu penelitian Ramadhan Restu, dkk, Ilmu Sosial Politik Universitas Padjajaran (2016) tentang “Implementasi E-Government di Kota Tangerang Menjadi Smart City” dengan hasil Implementasi program smart city masih belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa masalah, seperti belum maksimalnya sosialisasi, SDM belum kompeten, penanganan layanan lambat, dan tidak adanya landasan hukum yang mengatur tentang aplikasi.

Penelitian keempat, yaitu penelitian Wisnu Hardono, dkk, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015) tentang “Analisis Kualitas dan Efektifitas - *Government* sebagai media Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015” Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelayanan sudah baik, akan tetapi pengembangan e-Government di DIY masih belum tuntas, dilihat dari website yang belum berjalan, mengindikasikan adanya sistem SPBE yang belum sempurna

Penelitian kelima, yaitu penelitian Aprianty Diah, Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman (2016) tentang “Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Samarinda” Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan kebijakan *E-Government* dalam peningkatan mutu pelayanan publik mengalami perubahan meski masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya SDM, kesalahan komunikasi antara pimpinan dan pegawai.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni dengan penelitian ini akan dilakukan di Organisasi Pemerintah yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan menggunakan konsep *Smart Governance* yang tentunya di Kabupaten Rembang memiliki keberbedaan, baik itu dari keadaan dan kondisi dengan penelitian sebelumnya dan hal tersebut tentunya dengan masalah yang berbeda dan dengan organisasi serta pemasalahan dan faktor pendukung yang berbeda.

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *Smart Governance* di Kabupaten Rembang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menganalisis *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan menggunakan teori oleh Cohen (2014) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu *Online Service*, *Infrastructure*, dan *Open Government*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 (enam belas) orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik, Kepala Bidang Tata Kelola dan layanan Informatika, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Pengelola Sistem dan Jaringan, dan Unsur Pengguna Layanan SPBE di Kabupaten Rembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *Smart Governance* di Kabupaten Rembang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menggunakan Teori *Smart Governance* (Cohen, 2014) yakni *Online Service*, *Infrastructure*, dan *Open Government*. Adapun hasil pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Online Service

1. Online Procedure

Pengembangan aplikasi layanan administrasi pemerintahan dan publik secara online hingga saat ini terus dilakukan. Saat ini jumlah aplikasi dan website di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang berjumlah 43 Aplikasi dan website. Aplikasi dan website tersebut dibuat sebagai penunjang layanan publik online dan kinerja pegawai yang dapat diakses melalui komputer maupun handphone.

Keberhasilan penggunaan website dan aplikasi akan terus dikembangkan.

Layanan digital yang diberikan dari hasil observasi penulis merupakan suatu layanan website yang bertitik berat kepada layanan administrasi publik. hal ini tentunya menunjukkan bahwa layanan yang banyak dibutuhkan masyarakat adalah layanan kependudukan dimana kebutuhan mendasar ini mesti dipenuhi semua penduduk di negeri ini.

Bedasarkan obsevasi dan wawancara penulis, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan menggunakan aplikasi dan website dan hal tersebut mendapatkan respon positif oleh masyarakat menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Rembang telah mampu menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara adaptif pada aspek pelayanan dan terus menjawab kebutuhan zaman pada saat ini.

2. Electronic Benefit Payment

Pemerintah Kabupaten Rembang yang juga membuat elektronifikasi, yaitu sistem transaksi pembayaran retribusi non tunai. Awal dari penerapan pembayaran non tunai merupakan instruksi dari pusat. Kemudian instruksi tersebut direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Rembang meskipun hanya berada di beberapa titik. Namun, jumlah parkir elektronik non tunai sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya ruas jalan di Kota Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang telah berencana untuk menambah jumlah parkir elektronik non tunai secara bertahap untuk mencegah kebocoran PAD dan praktik juru parkir liar.

3.2. Infrastructure

1. Wifi Coverage

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyiapkan sarana wifi gratis di Setiap Balai Desa Seluruh Kabupaten Rembang. Namun hal tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah di Kabupaten Rembang dan banyaknya Jumlah Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Rembang. Fasilitas wifi gratis alangkah lebih baik jika dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Dengan hanya adanya wifi gratis di balai desa saja

Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang terbatas dan lebih diprioritaskan ke hal lain yang lebih penting, sementara dalam mewujudkan infrastruktur smart governance yang memadai, diperlukan anggaran yang besar. Ditambah dengan rata rata masyarakat kurang tertarik untuk pergi ke balai desa untuk sekedar menyambung jaringan internet, alangkah lebih baik jika wifi gratis juga dipasang di tempat yang banyak dikunjungi masyarakat seperti taman atau tempat wisata.

2. Broadband Coverage

Pada indikator broadband covarage dapat diartikan sebagai infrastruktur penghubung jaringan internet salah satunya adalah pengelolaan data. Rata-rata OPD yang ada di Kabupaten Rembang melakukan pengelolaan data secara mandiri. Menurut aturan yang berlaku seharusnya seluruh OPD wajib menyerahkan pengelolaan server kepada Dinkominfo, akan tetapi karena sumber daya manusia yang ada di OPD kebanyakan tidak mampu mengelola server secara mandiri, OPD yang memiliki hambatan baru akan menghubungi pihak Dinkominfo untuk berkonsultasi.

Pihak Dinkominfo juga mengaku jika secara infrastruktur belum mampu jika seluruh server disatukan dan dikelola oleh Dinkominfo. Hal tersebut dikarenakan Data Center yang tersedia belum memadai untuk menampung seluruh server. Ruang data center yang dimiliki ukurannya belum cukup luas dan

spesifikasinya belum mampu untuk mengolah data secara menyeluruh, sehingga pengelolaan data dilakukan dengan cara disebar pada masing masing OPD.

3. *Sensor Coverage*

Sementara dalam layanan Smart Governance untuk cakupan sensornya digunakan sebagai sensor wajah untuk sistem absensi dan presensi yang terintegrasi dengan sistem jaringan intra lokal dengan memanfaatkan *Wide Area Network* (WAN), Pemerintah Kabupaten Rembang juga Berencana untuk mengadakan kamera analitis/sensor di beberapa titik di Kabupaten Rembang, kamera sensor tersebut targetnya 2029 sudah terpasang di banyak titik di Kabupaten Rembang. Kamera sensor ini nantinya bisa menyediakan informasi seperti debu, arah angin hingga suhu secara real time. Hal tersebut sudah direncanakan pada masterplan smartcity Kabupaten Rembang.

4. *Integrated Health and Safty Operations*

Cohen menjelaskan bahwa layanan yang terintegrasi adalah indikator penting dalam mengukur infrastruktur di suatu tempat. Terutama dalam hal ini layanan kesehatan dan keselamatan. Jika berbicara tentang integrasi layanan kesehatan dan keselamatan, maka seluruh data yang berkaitan haruslah terintegrasi. Saat ini terdapat dua aplikasi yang sudah terintegrasi yaitu Aplikasi Cek Presensi yang digunakan untuk absensi pegawai Pemerintah Kabupaten Rembang yang terintegrasi dengan E-Kinerja. Dan yang kedua merupakan aplikasi Rembang Gemilang, aplikasi Rembang Gemilang ini yang terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, tampak satu aplikasi non pelayanan kesehatan dan keselamatan sudah diintegrasikan. Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan dengan mengunduh aplikasi Rembang Gemilang bahwa aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan layanan kesehatan seperti antre puskesmas dan RSUD hal tersebut kemudian dibenarkan bahwa memang aplikasi Rembang Gemilang sudah terintegrasi dengan layanan kesehatan.

3.3. *Open Government*

1. *Open Data*

Cohen mengukur open data menurut kuantitas data yang bisa diakses oleh publik dan juga kemudahan mengakses terhadap source data juga menjadi bagian penting dalam keterbukaan data. Source data sendiri merupakan data mentah yang belum diolah sehingga belum bisa diakses publik.

portal *open data* Kabupaten Rembang menyajikan 1700 kumpulan data yang terdiri dari 58 organisasi dan 15 grup. Hal ini membuat masyarakat dapat terbantu dalam mencari data yang diperlukan karena dapat dengan mudah diakses pada portal tersebut. Saat ini jumlah rinci dataset pada *open data* di Kabupaten Rembang berjumlah 1748 dataset. 1748 set.data terbanyak dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 896 set data, kemudian disusul dengan data dari dinas kesehatan yaitu 198 set data dan 137 set data dari Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Rembang.

Data yang ada pada portal *open data* juga memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data pada portal open data terdiri dari 2 sumber, yaitu pertama data yang diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan yang kedua adalah data dari OPD Kabupaten Rembang yang dikirim secara rutin. Data yang dari BPS sudah valid kebenarannya karena sumbernya BPS, akan tetapi untuk data dari OPD, tidak ada mekanisme untuk memastikan data tersebut benar,

hanya konfirmasi dari pimpinan dari OPD tersebut menyebabkan rentan terjadi kesalahan data. Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki komitmen dalam mewujudkan open data guna mendukung keterbukaan informasi publik. Semua informasi dapat diakses oleh publik melalui laman <https://data.rembangkab.go.id/>.

2. *Open Apps*

Pada indikator Open Apps sendiri, Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki beberapa aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. penggunaan mobile apps dari sisi pemanfaatan aplikasi smart governance masih belum banyak, akan tetapi pihak dari dinas komunikasi dan informatika akan terus berupaya agar melengkapi layanan yang dibutuhkan masyarakat”

Berdasarkan informasi diatas belum banyak mobile apps yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terusberupaya dalam peningkatan mobile apps. Berikut merupakan daftar mobile apps yang sudah ada dan dapat digunakan:

1. Rembang Gemilang

Sebuah aplkasi pendukung smart governance yang dapat diunduh mealui android dengan memiliki bebeapa fitur layanan yang disediakan, seperti wisata, berita, JDIH, PBB, Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPMD), dan CCTV yang dapat dipantau oleh masyarakat di beberapa titik strategis.

2. Sadar- Satu data Rembang

Merupakan Aplikasi Harmonisasi data statistik menuju rembang smart city yang berisi data terkini dan strategis dari Kabupaten rembang meliputi data kesehatan, data penddikan, data ketenag kerjaan, index pembangunan manusia, dan data kependudukan.

3. Siwaspada Rembang

Siwaspada rembang merupakan solusi inofatif terkait pengawasan tematik DPRD Kabupaten rembang yang mencakup pelaksanaan tindak lanjut pengawasan masyarakat serta progres capaian realisasi anggaran.

4. Enjoyrembang

Enjoyrembang sendiri merupakan sebah aplikasi pemandu wisata di kabupaten rembang yang dialaminya terdapat informasi terkait berbagai macam obyek wisata yang ada di Kabupaten Rembang

3. *Privacy*

Cohen juga mengukur open government dengan indikator privacy yang bertujuan mengetahui kebijakan privasi dalam melindungi data warganya. Salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan back up data dan mendeteksi serangan dini atau mati listrik data bisa segera kita lindungi. Kemudian proteksi data di Dinkominfo sudah mengikuti standar bssn dan biasanya jika ada yang menerobos sistem, biasanya sudah dideteksi pada firewall server, sebelum penyerang masuk ke sistem sudah di blokir pada firewall server.”

Berdasarkan informasi, bahwa untuk menjaga keamanan data dengan melakukan back up data sehingga ketika terjadi serangan ata listrik mati data bisa segera dilindungi. Kemudian untuk poteksi data, pihak dai Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mengikuti standar BSSN.

3.4 **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Sama dengan temuan sebelumnya dimana *Smart governance* dianggap memiliki peran yang penting dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian penelitian

ini juga berfokus pada bagaimana *Smart Governance* dengan menggunakan teknik metode yang sama namun dengan perbedaan fokus penelitian dan tempat penelitian dimana pada penelitian sebelumnya berada pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian ini yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah yang lebih mengedepankan teknologi informasi dan komunikasi sehingga jauh berbeda hasil penelitian yang didapatkan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh . Hal itu dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Wisnu Hardono, dkk dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2015) yang menunjukkan bahwa pengembangan *e-Government* di DIY masih belum tuntas, dilihat dari website yang belum berjalan, mengindikasikan adanya sistem SPBE yang belum sempurna. Namun penelitian ini dibuktikan sudah berjalan dengan baik dari terpenuhinya *Smart Governance* yang dianalisis menggunakan teori Cohen (2014). online service, secara umum Pemerintah Kabupaten Rembang sudah menjalankan prosedur online pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi publik serta pembayaran online. Namun, khusus untuk pembayaran online, perlu diperluas lagi sehingga tidak terbatas di beberapa area dan kawasan. Pada dimensi infrastructure, terdapat kekurangan pada jumlah wifi gratis, data center, dan integrasi pelayanan kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada open government, Pemerintah Kabupaten Rembang menunjukkan komitmennya melalui Portal *Open Data* Kabupaten rembang dan aplikasi Rembang Gemilang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa 1. Proses *Smart Governance* sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, karena pada ketiga dimensi dari smart governance masih terdapat kekurangan. Pertama online service, secara umum Pemerintah Kabupaten Rembang sudah menjalankan prosedur online pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi publik serta pembayaran online. Namun, khusus untuk pembayaran online, perlu diperluas lagi sehingga tidak terbatas di beberapa area dan kawasan. Pada dimensi infrastructure, terdapat kekurangan pada jumlah wifi gratis, data center, dan integrasi pelayanan kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada *open government*, Pemerintah Kabupaten Rembang menunjukkan komitmennya melalui Portal *Open Data* Kabupaten rembang dan aplikasi Rembang Gemilang. Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam mengatasi hambatan pada *Smart Governance* di kabupaten Rembang yaitu dengan menaikkan persentase website OPD dan menambah jumlah ruas jalan yang memiliki parkir elektronik non tunai. Kemudian upaya Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam dimensi *infrastructure* adalah dengan membangun *command center* serta memperluas jaringan intranet antar OPD. Selanjutnya upaya Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam meningkatkan *open government* adalah integrasi portal *open data* Kabupaten Rembang dengan portal data nasional, integrasi aplikasi dan bimbingan teknis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas yaitu hanya 14 hari. Kemudian penelitian ini juga hanya berfokus pada *Smart Governance* pada satu instansi/lembaga yang didalam penelitian ini hanya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang terutama pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

Arah Masa Depan Penelitian(future work). Penulis memfokuskan hasil penelitian terkait dengan *Smart Governance* sebagai pemimpin dalam menggerakkan media informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dan pemerintah daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik, Kepala Bidang Tata Kelola dan layanan Informatika, dan seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rembang yang telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cohen. (2014). *The Smartest Cities In The World 2015*. Melalui: <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world2015-methodology>
- Diah, Aprianty. 2016. Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Samarinda. Universitas Mulawarman
- Hardjaloka, Loura. “Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik”. Jurnal Rechts Vinding. Vol 3. No 3 Tahun 2014.
- Hardono, Wisnu. 2015. Analisis Kualitas dan Efektifitas E-Government sebagai Media Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Restu, Ramadhan. 2016 Implementasi E-Government di Kota Tangerang Menjadi Smart City. Universitas Padjajaran
- Sartika, Maulina. 2020. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serdan Bedagai. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
- Vaughan, Regan. 2021. Implementasi Kebijakan *E-Government* melalui web subang.co.id. Universitas Pasundan Bandung